

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Kebangkitan gerakan oposisi di Myanmar yang dimotori oleh Partai LND dengan mengkampanyekan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan politik dan bernegara, ternyata tidak bersinergi dengan gerakan-gerakan persamaan hak dari etnis minoritas. Bahkan, untuk kasus Rohingya, yang merupakan salah satu isu yang paling sensitif terkait dengan konflik antar etnis, isu tersebut tidak menjadi perhatian utama dan prioritas penyelesaian secara konstruktif dari kaum oposisi yang telah berhasil menggulingkan rezim pemerintahan junta militer melalui pemilu legislatif.

Konflik etnisitas yang melibatkan kaum muslim Rohingya dan umat Budha di Rakhine menjadi perhatian utama dunia internasional melalui berbagai pemberitaan di media massa seiring dengan meletusnya kembali konflik dan pertikaian yang berbau SARA ini pada permulaan bulan Juni 2012 yang dipicu oleh tuduhan umat Budha terhadap kelompok muslim Rohingnya yang telah melakukan perkosaan dan pembunuhan terhadap seorang wanita Rakhine.

Negara-negara anggota ASEAN khususnya yang mayoritas berpenduduk muslim, seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Indonesia juga tidak menunjukkan sikap empatik yang benar ketika menangani pengungsi Rohingnya. Banyak pengungsi yang menyeberang ke Banglades dikembalikan

ke Myanmar, yang berarti mendorong ke neraka kematian. Seharusnya dunia Islam berkewajiban untuk memberikan solusi konstruktif dalam melepaskan penderitaan dan penindasan yang dialami oleh etnis Rohingya, baik melalui kampanye, diplomasi, maupun kemanusiaan. Mencuatnya isu Rohingya berpotensi menjadi ancaman serius bagi proses demokratisasi yang selama ini dikampanyekan oleh kaum oposisi dengan mesin politiknya Partai LND yang telah memenangkan pemilu legislatif pasca lengsernya pemerintahan junta militer.¹

Myanmar telah mengalami banyak masalah unifikasi sejak merdeka. Etnis-etnis minoritas, yang sejak awal memang sudah tersisihkan dalam politik dan pembangunan, menuntut otonomi yang lebih luas. Struktur politik dan akses ekonomi didominasi etnis Burma yang jumlahnya mencapai 70 persen. Adapun etnis minoritas yang populasinya terbanyak di daerah pegunungan dan perbatasan, baik India, Banglades, China, Laos, maupun Thailand menjadi masyarakat kelas dua. Setidaknya tercatat ada 137 etnik minoritas di Myanmar.

Sejak tahun 1960-an, rezim militer di bawah Jenderal Ne Win melakukan pendekatan baru untuk menghentikan pemberontakan disamping operasi militer, melalui penerapan kebijakan program pangkas empat (memangkas akses pangan, dana pembangunan, kecerdasan, dan akses ke pemerintahan). Program ini menjadi Senjata utama bagi pemerintahan junta militer untuk

¹ Media Indonesia, edisi Selasa 14 Agustus 2012

mengatasi pemberontakan dan perlawanan etnis minoritas terhadap pemerintahan junta militer.²

Salah satu etnis minoritas yang paling merasakan penderitaan dan penindasan baik oleh pemerintahan junta militer maupun oleh etnis lain terutama etnis Arakan yang sebagian besar penduduknya beragama Budha yang bermukim di negara bagian Rakhine adalah etnis Rohingya yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Meningkatnya eskalasi konflik antar etnis terutama yang melibatkan etnis Rohingya terpotret sebagai pembantaian minoritas Muslim oleh negara mayoritas Buddha. Potret buram ini dipertegas oleh kebijakan Pemerintah Myanmar yang tampak jelas seperti membiarkan pembantaian itu, bahkan sementara jadi sekutu bagi etnis Arakan.

Tekanan, penindasan dan bahkan penghapusan etnis Rohingya sebagai salah satu etnis yang ada di Myanmar yang berlangsung sejak berkuasanya pemerintahan junta militer sampai dengan era demokrasi yang selama ini mendapat dukungan penuh Dunia Barat khususnya Amerika Serikat berpotensi menjadi ancaman serius bagi masa depan keberlangsungan demokratisasi yang selama ini diperjuangkan oleh bangsa Myanmar yang dimobilisasi oleh kaum oposisi.

Seiring mencuatnya isu Rohingya, semakin menyudutkan posisi pemerintahan Myanmar dalam pembangunan demokrasi. Sebab, salah satu pilar demokrasi adalah menghargai keberagaman (diversity) dan mengakui persamaan hak, martabat dan kewajiban setiap warga negara. Oleh sebab

² *Ibid*, 14 Agustus 2012

itulah, Pemerintahan Myanmar mulai menunjukkan sikap lunak dalam menyelesaikan konflik antar etnis khususnya etnis Rohingnya. Masyarakat internasional khususnya dunia Islam juga semakin menunjukkan perhatian dan terus mendorong penyelesaian konstruktif terkait dengan etnis Rohingya. Munculnya isu Rohingnya ditengah upaya mewujudkan proses demokratisasi Myanmar pasca lengsernya pemerintahan junta militer, mendorong penyusun untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Ambiguitas Kebijakan Pemerintah Myanmar dalam Menyelesaikan Konflik Rohingya.”**

B. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya ambiguitas kebijakan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan konflik Rohingya.

C. Latar Belakang Permasalahan

Etnis Rohingnya yang merupakan komunitas pemeluk agama Islam di negara yang mayoritas beragama Budha, dianggap sebagai imigran gelap yang eksistensinya tidak diakui secara resmi sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Pemerintah Myanmar tidak mengakui dan tidak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Sebagai akibat tidak adanya kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak bisa mengakses pendidikan, layanan

kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Mereka betul-betul terabaikan dan terpinggirkan.³

Pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Hal itu ditegaskan kembali oleh Presiden Myanmar, Thein Sein, dalam *Al Jazeera*, 29 Juli 2012 bahwa Myanmar tidak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada kelompok Rohingya yang dianggap imigran gelap dan pelintas batas dari Bangladesh itu. Inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik antar etnis yang memosisikan etnis Rohingnya sebagai target utama untuk disingkirkan dari bagian warga negara Myanmar.⁴

Sebagai komunitas yang sudah lama menetap di sebuah wilayah yang kebetulan kini menjadi bagian dari negara Myanmar, tentu saja sudah selayaknya mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka, terutama status kewarganegaraan. Meskipun demikian, sikap pemerintah Myanmar sudah jelas bahwa Myanmar tak mungkin memberikan kewarganegaraan kepada Rohingya. Namun, Myanmar menawarkan solusi berupa pengiriman ribuan orang Rohingya ke negara lain atau tetap tinggal di Arakan, tetapi berada di bawah pengawasan PBB. Terlihat jelas bahwa akar utama persoalan konflik Rohingnya adalah sikap Pemerintah Myanmar sejak era pemerintahan junta militer sampai dengan era pemerintahan demokrasi menunjukkan sikap keengganannya untuk mau menerima dan memberikan status

³http://www.mizan.com/news_det/mengenal-etnis-rohingya-dari-sudut-pandang-sejarah.html, diakses 17 Oktober 2012.

⁴ *Ibid*, 17 Oktober 2012.

kewarganegaraan bagi etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar.⁵

Etnis Rohingya terdiskriminasi dari rakyat Myanmar lain. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 800 ribu warga etnis Rohingya saat ini masih bertahan di Myanmar. Kehidupan warga Rohingya di Myanmar sangat termarginalkan. Mereka memerlukan izin bila ingin menikah. Selain itu, etnis Rohingya juga dilarang memiliki anak lebih dari dua. Bahkan untuk bepergian ke luar desanya, mereka pun diharuskan memiliki izin.⁶

Salah satu peristiwa meletusnya konflik komunal dalam skala besar adalah peristiwa konflik etnis Rohingnya dan etnis Rakhine di Arakan pada Juni 2012 yang dipicu oleh isu adanya pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda etnis Rohingya terhadap gadis etnis Rakhine. Isu tersebut selanjutnya berkembang menjadi konflik komunal antar kedua etnis yang memang sudah lama terpendam permusuhan dan kebencian serta kebijakan marginalisasi oleh rezim pemerintahan junta militer.

Pada tanggal 8 Juni 2012, ribuan orang Rohingya rusuh setelah salat Jumat, menghancurkan bangunan-bangunan dan membunuh sejumlah orang. Pada minggu berikutnya, pasukan keamanan Myanmar bertindak represif terhadap etnis Rohingya, mengakibatkan penangkapan massal dan sejumlah kematian. Tanggal 9 Juni 2012, kekerasan meletus disekitar ibu kota Arakan. Masa Rohingya dan Rakhine saling menyerang dan membakar rumah serta bangunan peribadatan. Sebelumnya di Ramri pada tanggal 28 Mei 2012

⁵ *Ibid*, 17 Oktober 2012

⁶ <http://jakarta.okezone.com/read/2012/08/17/411/679164/sikap-diam-suu-kyi-atas-rohingya-terus-dikecam>, diakses 18 Oktober 2012

seorang perempuan etnis Rakhine diperkosa dan dibunuh. Pelakunya diduga tiga pria etnis Rohingyahal ini menyebabkan sekelompok orang menghentikan sebuah bus dan membunuh 10 pria muslim di dalamnya pada 3 Juni 2012 di Toungop.⁷

Sejak insiden 10 orang Muslim terbunuh terus memanas di kawasan Arrakan, Burma. Muslim Rohingya menjadi sasaran. Kondisi ini dipicu juga oleh bibit perseteruan yang sudah terpendam lama, yaitu perseteruan antara kelompok etnis Rohingya yang Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Rohingya tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat. Ditambah lagi agama yang berbeda. Sejak insiden tersebut sudah terjadi tragedi pembantaian etnis Rohingya lebih dari 6000 orang dan diprediksi terus bertambah seiring ketidakjelasan kebijakan Myanmar dalam menyelesaikan konflik Rohingnya secara tuntas, menyeluruh dan konstruktif.

Dengan adanya konflik yang berkepanjangan tersebut, hingga saat ini pemerintah Myanmar masih ambigu dalam mengambil kebijakan. Meskipun pemerintah Myanmar telah berinisiatif untuk membuka pintu dialog dengan lingkungan internasional, namun pemerintah Myanmar juga melakukan pembiaran dan bahkan memelihara konflik yang terjadi selama bertahun-tahun tersebut. Padahal pembantaian yang terjadi terhadap etnis Rohingya merupakan tindakan diskriminasi dan pengingkaran terhadap kemanusiaan. Dalam Pasal 15 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan 'Setiap orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak

⁷ Kronologi kekerasan di Arakan, Media Indonesia, Selasa , 14 Agustus 2012

seorangpun boleh dibatalkan hak kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.⁸

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

“Mengapa terjadi ambiguitas kebijakan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan konflik Rohingya?”

E. Kerangka Pemikiran

Analisa pokok permasalahan dalam penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut:

1. Model Pembuatan Keputusan Gabriel Almond (Struktural Fungsional)

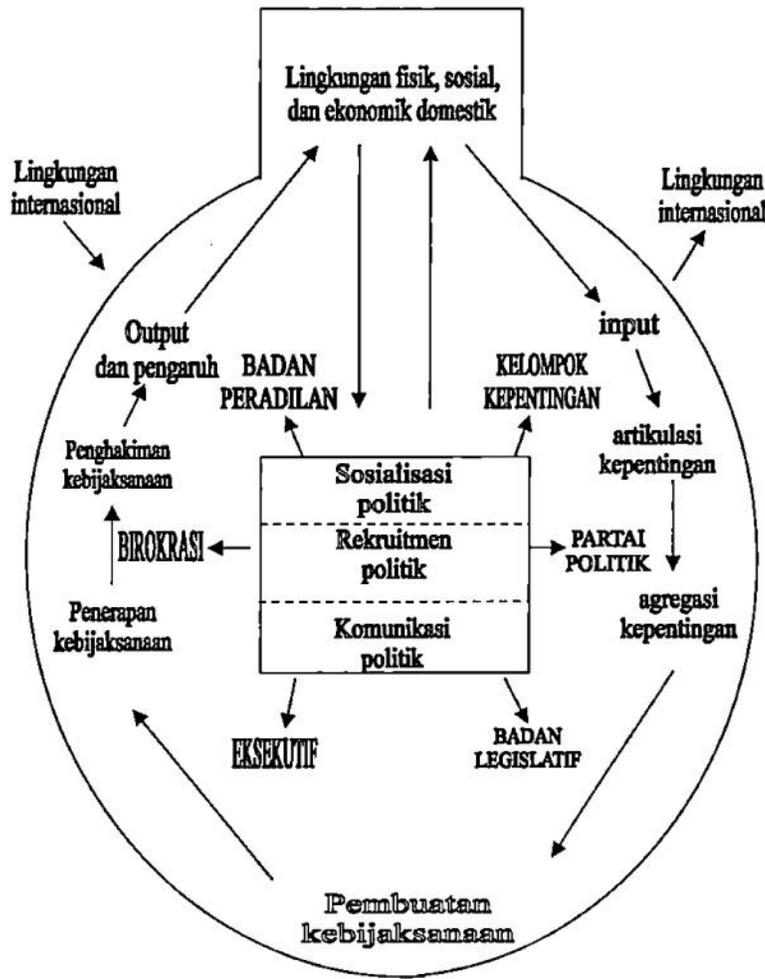
Kerangka teori yang digunakan penulis sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah teori mengenai “*Analisis Sistem Politik*” yang dikemukakan oleh Gabriel Almond, yang dikenal dengan model pembuatan keputusan (Struktural- Fungsional).⁹ Teori ini mengemukakan beberapa hal penting yang terkait dengan sistem politik dan lingkungannya.

⁸ <http://id.wikisource.org/>

⁹ Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hal. 30

Sebagai suatu sistem, tentu saja sistem politik memiliki ciri-ciri dan elemen tertentu yang saling terkait satu sama lain seperti gambar berikut:

Gambar 1. Sistem Politik: struktur dan Fungsi (1964: 30)



Gambar 1 menunjukkan bagaimana kita menghubungkan struktur dengan fungsi, dan proses dengan kebijaksanaan dan bekerjanya sistem. Di tengah-tengah gambar 1 itu terdapat tiga fungsi politik yang tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan

(public policy) tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Panah-panah yang berasal dari fungsi – fungsi ini dan menunjuk pada masyarakat (lingkungan domestik), dan pada kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan-badan peradilan menggambarkan pengaruh dari ketiga fungsi ini.¹⁰

Di pinggir-pinggir lingkaran terdapat fungsi-fungsi yang yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam setiap sistem politik sebelum kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan dapat ditetapkan individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin mereka dapatkan dari politik. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian harus digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan seperti peningkatan atau penurunan pajak, peningkatan atau pengurangan dan kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Demikianlah, panah dipinggir kanan itu dari artikulasi kepentingan mengarah ke agregasi kepentingan atau penggabungan kepentingan. Selanjutnya alternatif-alternatif kebijaksanaan itu dipertimbangkan dan ditentukan pilihan. Keputusan ini harus dilaksanakan, dan bila keputusan itu ditentang atau diselewengkan maka harus ada proses penghakiman (adjudication).¹¹

¹⁰ *Ibid*, hal. 30

¹¹ *Ibid*, hal. 31

Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, faktor internal dan eksternal saling berkaitan. Keterkaitan kedua faktor inilah yang akan menentukan kebijakan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan konflik Rohingya.

Mengacu pada Teori Sistem Politik di atas, pada pokok permasalahan penelitian ini dapat ditunjukkan bahwa lingkungan dalam hal ini berupa kondisi sistem politik dan pemerintahan Myanmar yang selalu diwarnai dengan konflik antar etnis. Pemerintahan Junta Militer cenderung melakukan pembiaran dan bahkan memelihara konflik antar etnis demi kepentingan kelanggengan kekuasaan dan pemerintahan junta militer. Di sisi lain, kaum oposisi terus berjuang mewujudkan Myanmar sebagai negara yang berlandaskan demokrasi dengan prinsip menghargai keberagaman etnis atas dasar persamaan harkat, martabat, kedudukan dan sebagai bagian dari komponen bangsa Myanmar. Konflik yang terjadi antara etnis Rohingnya dan etnis Rakhine menjadi konflik yang paling lama dan paling rumit, bahkan konflik ini menimbulkan stigmatisasi masyarakat internasional bahwa konflik tersebut sebagai bentuk tekanan kelompok mayoritas yaitu etnis Rakhine yang beragama Budha terhadap kelompok minoritas etnis Rohingya yang beragama Islam dan bersifat sensitif terkait dengan isu SARA. Pemerintahan Junta Militer selama ini cenderung memberikan dukungan penuh terhadap etnis Rakhine untuk terus melakukan penekanan, pengusiran, terror dan bahkan pembersihan etnis terhadap komunitas Rohingnya.

Pasca lengsernya pemerintahan Junta Militer dan kemenangan kaum oposisi yang selama ini mengkampanyekan isu-isu demokrasi dengan dukungan penuh Dunia Barat khususnya Amerika Serikat ternyata tidak memberikan harapan baru bagi penyelesaian konflik yang bernuansa SARA tersebut. Ini terlihat dengan sikap Pemerintah Myanmar pasca pemilu legislatif yang tidak menjadikan isu konflik Rohingya sebagai perhatian utama dan skala prioritas untuk segera ditemukan penyelesaian yang konstruktif dan tuntas. Sebab, isu konflik Rohingnya berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan masa depan di Myanmar. Sikap pasif yang ditunjukkan oleh Pemerintah Myanmar telah memancing reaksi internasional termasuk dunia Islam, untuk segera adanya keterlibatan masyarakat internasional dalam menyelesaikan konflik Rohingnya yang telah lama mengalami penderitaan hidup akibat tekanan yang dilakukan secara terus-menerus oleh Pemerintahan Junta Militer dan etnis-etnis lainnya yang ada di Myanmar.

seiring mencuatnya isu Rohingnya dalam skala global, maka dukungan masyarakat internasional termasuk PBB dan dunia Islam semakin kuat untuk menyuarkan ketidakadilan dan pelanggaran HAM yang selama ini dialami oleh etnis Rohingnya dari pemerintahan Myanmar. Desakan masyarakat internasional terhadap pemerintahan Myanmar untuk segera mengambil solusi yang konstruktif mendorong pemerintahan Myanmar sedikit bersikap lunak dengan mulai membuka diri jalan perundingan dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik Rohingnya dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediasi.

Meskipun sudah diupayakan berbagai jalur perundingan dan diplomasi, akan tetapi belum menemukan solusi konstruktif dalam menyelesaikan konflik Rohingya secara tuntas. Akar permasalahan utama terletak pada keengganan Pemerintahan Myanmar untuk menerima etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari komponen dan warga negara Myanmar. Pemerintahan Myanmar tetap bersikukuh pada sikap dan keyakinannya bahwa etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap sehingga tidak berhak mendapatkan status kewarganegaraan dan tinggal secara layak sebagaimana warga negara lainnya di wilayah Myanmar. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa keberadaan etnis Rohingya selama ratusan tahun mendiami wilayah Propinsi Rakhine sehingga mereka berhak mendapatkan status kewarganegaraan dan hidup secara layak, aman dan damai dengan komponen bangsa lainnya.

Teori sistem politik tersebut di atas sangat penting dalam membantu menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Terlebih lagi etnis Rohingya sebagai salah satu etnis yang cukup lama mendiami wilayah Propinsi Rakhine selama ini termarginalkan dengan berbagai kebijakan pemerintahan Myanmar selama rezim Junta Militer hingga sekarang. Sehingga hal ini memunculkan konflik yang berkepanjangan dan mengancam masa depan demokrasi Myanmar di masa-masa mendatang yang sudah kental dengan konflik antar etnis.

Seiring mencuatnya konflik Rohingya di Myanmar tersebut, isu-isu Rohingya juga semakin mencuat ke permukaan di tingkat global. Sehingga dukungan masyarakat internasional dan dunia Islam terhadap perjuangan etnis

Rohingya dalam mempertahankan eksistensinya di wilayah Propinsi Rakhine semakin mendesak sikap pemerintahan Myanmar untuk segera mengambil kebijakan dan penyelesaian konstruktif terhadap masalah konflik Rohingya di Arakan.

2. Teori Konflik

Menurut Webster (1966), istilah konflik didalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi arti kata itu kemudian berkembang dengan masuknya ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide, dan lain-lain. Dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga telah menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri.¹²

Secara singkat, istilah konflik menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Menurut Webster dalam definisinya yang kedua, konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.¹³

Menurut David E. Apter, masyarakat yang penduduknya tidak homogen tetapi terbagi dalam kelompok-kelompok suku, etnik, rasial, dan agama

¹² Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 9

¹³ *Ibid*, hal. 10

(masyarakat plural) seperti yang sering terjadi, beberapa dari faktor-faktor ini meningkatkan kecenderungan kearah konflik daripada kompromi.¹⁴

Dari pernyataan ini, dapat kita ketahui bahwa David E. Apter melihat masyarakat yang multi etnis selalu terdapat kecenderungan-kecenderungan yang dapat menimbulkan gesekan-gesekan ataupun letupan-letupan antar etnis yang satu dengan yang lainnya. Yang pada akhirnya akan dapat mengakibatkan pecahnya suatu konflik etnis. Sedangkan kompromi ataupun perundingan hampir sama sekali tidak berpeluang menyelesaikan masalah yang muncul. Kalaupun bisa, itu hanya sebagian kecil dari banyak kasus yang terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu sebab yang dominan dalam konflik antar etnis adalah karena adanya kelompok-kelompok yang terbagi berdasarkan suku, ras, agama, dan bahasa.

Kemudian, James E. Dougherty menyatakan bahwa konflik manusia adalah konflik sederhana berupa dorongan-dorongan untuk terus hidup yang saling bersaing konflik tersebut adalah konflik dimana setiap manusia atau kelompok berusaha membentengi kekuasaan dan prestisenya terhadap bahaya, ekspresi kekuasaan, dan kebangsaan yang bersaing oleh karena justru kepemilikan kekuasaan dan prestise oleh pihak lain.. maka konflik ini pada hakekatnya merupakan konflik yang sulit dan keras daripada sekedar kompetisi antara berbagai dorongan-dorongan untuk kelangsungan hidup di alam.

¹⁴ David E. Apter, *Pengantar Analisa Politik*, LP3S, Jakarta 1998, hal. 294

Melihat pendapat James E. Dougherty ini lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa suatu konflik terjadi karena timbulnya suatu perasaan yang dialami oleh manusia dalam suatu suku sebagai akibat adanya persaingan-persaingan dengan suku lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup serta untuk mempertahankan kelangsungan hidup sukunya sendiri¹⁵. Persaingan-persaingan ini pada akhirnya juga menyangkut pada kebutuhan-kebutuhan non materi, seperti halnya kebutuhan politik, sosial, dan budaya. Dimana persaingan-persaingan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan non materi tersebut selalu diikuti dan berpeluang besar menyebabkan konflik berdarah.

Persaingan yang ada kemudian muncul di Rakhine dari kelompok minoritas Rohingya yang merasa tertindas dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berawal dari tidak terpenuhinya kebutuhan akan politik yang dirasakan etnis Rohingya telah menyulut pertikaian, juga perlakuan diskriminatif dari pemerintah dan ketidaksudian orang-orang Rakhine untuk menerima kehadiran etnis rohingya yang asal usulnya dianggap tidak jelas, membuat kedua kubu saling menaruh kebencian dan masalahnya adalah tidak pernah ada dialog untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam psikologi hal seperti ini tidak baik karena menyimpan permasalahan dalam waktu lama samapi menumpuk akan bisa menimbulkan konflik yang besar.

¹⁵ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff Jr, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, diterjemahkan oleh M. Amin Rais, Fisipol UGM, Jogjakarta, 1983, hal. 28

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran penelitian di atas, maka penyusun dapat merumuskan hipotesa penelitian sebagai berikut.

Pemerintah Myanmar cenderung melakukan pembiaran dan bahkan memelihara konflik yang terjadi, hal ini dikarenakan oleh adanya tuntutan dari internal dan eksternal yang berbeda. Selain daripada itu pemerintah juga mendapat tekanan dari mayoritas etnis Budha sehingga pemerintahan Myanmar hingga saat ini dinilai belum menunjukkan sikap tegasnya terhadap penyelesaian konflik Rohingya.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu menggunakan pola-pola, pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber dari internet.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah diawali dengan pembahasan nasib dan kehidupan etnis Rohingnya selama rezim junta Militer sampai dengan masa pemerintahan demokrasi pasca lengsernya Junta Militer.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I terdiri dari Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang: alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tentang profil Negara Myanmar dengan beragam etnisitas yang ada didalamnya, asal usul etnis Rohingnya dan kondisi kehidupannya di Myanmar serta sebab terjadinya konflik Rohingnya.

BAB III menguraikan tentang berbagai macam tuntutan kepada pemerintah Myanmar yang berasal dari dalam sistem politik itu sendiri seperti kelompok oposisi dan kelompok kepentingan lainnya.

BAB IV membahas tentang berbagai macam tuntutan kepada pemerintah Myanmar yang berasal dari lingkungan sekitar sistem politik (lingkungan internasional), seperti ASEAN, OKI, dan lainnya.

BAB V merupakan kesimpulan yang menjadi jawaban akhir atas pengajuan hipotesa penelitian.